

Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan

Muhammad Adryan Okuputra^{1✉}, Nasikh²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri, Malang.

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi adalah Kota Yogyakarta. Beberapa inovasi terus dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya adalah inovasi Gandeng Gendong. Inovasi ini merupakan inovasi yang melibatkan lima stakeholder (Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas, dan Kampung) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan lingkungan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mencari tau pengaruh inovasi gandeng gendong terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengambilan data secara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Responden wawancara diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1)Inovasi daerah melalui program gandeng gendong berperan penting dalam memberdayakan dan menurunkan jumlah masyarakat miskin, (2)Inovasi ini secara efektif berhasil meningkatkan kesejahteraan dan, (3)Inovasi ini berhasil menciptakan kemandirian usaha

Kata kunci: Inovasi daerah; kemiskinan; pemberdayaan; gandeng-gendong

The influence of regional innovation on poverty

Abstract

Poverty is still one of the problems that exist in Indonesia, one of the areas that have a fairly high poverty rate is the city of Yogyakarta. Several innovations continue to be made to reduce poverty, one of which is the Gandeng Gendong innovation. This innovation is an innovation that involves five stakeholders (City, Corporation, Campus, Community, and Village) in the context of accelerating poverty alleviation by emphasizing community empowerment, improving welfare, and advancing the environment in the City of Yogyakarta. This study aims to find out the effect of gandeng gendong innovation on poverty in the city of Yogyakarta. This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis methods Miles and Huberman models. The data used is primary data with data collection techniques by interview, observation, and document study. Interview respondents were taken using the purposive sampling technique. The results of this study indicate that; (1) Regional innovation through the gandeng gendong program plays an important role in empowering and reducing the number of poor people, (2) This innovation has effectively succeeded in increasing welfare and, (3) This innovation has succeeded in creating business independence

Key words: Regional innovation; poverty; empowerment; gandeng-gendong

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Menurut (Maipita & Fitrawaty, 2014) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Lebih lanjut Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: (1) Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (2) Rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan, (3) Akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Bappenas, 2021)

Sebagai lembaga nasional, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau disebut Basic Needs Approach untuk mengukur kemiskinan. Konsep ini berdasarkan pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada dibawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong miskin. (Badan Pusat Statistik).

Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. Menurut (Todaro & Smith, 2015) kemiskinan terjadi bukan karena tidak memiliki komoditi tetapi karena masyarakat kurang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari komoditi tersebut. Kemudian menurut (Dowling & Valenzuela, 2010), kemiskinan terjadi karena rendahnya modal manusia, seperti pelatihan, pendidikan, atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik. Lebih lanjut (Kuncoro, 1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi. Pertama, pada tingkat mikro kemiskinan disebabkan oleh kepemilikan sumber daya yang tidak merata dan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses permodalan.

Secara khusus, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan modal, terbatasnya lapangan kerja, pendidikan yang rendah, malas bekerja, dan beban keluarga (Itang, 2015). Lebih lanjut, hasil penelitian (Pratama, 2014) menjelaskan bahwa variabel inflasi, konsumsi, tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan indeks pembangunan manusia (IPM), secara simultan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Selain itu (Tisniwati, 2012) menemukan bahwa angka harapan hidup memainkan peran penting dalam tingkat kemiskinan, setiap penurunan 1% angka harapan hidup berpotensi meningkatkan angka kemiskinan (jumlah orang miskin) sebesar 6,9 persen.

Berbagai program dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, (Remi & Tjiptoherijanto, 2002) menjelaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada kelompok sasaran dan daerah mana yang ditargetnya, misalnya siapa dan dimana mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan (Todaro & Smith, 2015) yang menuliskan bahwa diperlukan lebih banyak pengetahuan tentang siapa yang termasuk golongan miskin dan apa karakteristik ekonomi mereka sebelum merumuskan program dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Menurut (Bappenas, 2007) program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup program-program yang ditujukan khusus untuk kaum miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, keluarga miskin dalam kelompok ini akan sangat diuntungkan. Contoh programnya antara lain bantuan beras untuk masyarakat miskin, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan. Sedangkan kelompok kedua tidak hanya masyarakat miskin yang menerima tapi juga masyarakat dari semua golongan pendapatan. Contoh program ini antara lain pengurangan biaya sekolah, penyediaan obat generic dan pendanaan pelayanan kesehatan. Penelitian (Sutikno et al., 2015) memaparkan program-program yang berpotensi mengurangi kemiskinan antara lain: pembentukan koperasi simpan pinjam, pelatihan dan pendampingan wirausaha, pengelolaan sampah rumah tangga, penyediaan air bersih, pembangunan desa dengan pendayagunaan air bersih, dan program pendidikan paket A, B, dan C

Pemerintah dengan segala kekuasaannya terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan. Terdapat tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, diantaranya (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan, (2) pemerintah yang baik, dan (3) pembangunan sosial. Untuk

mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah yang terarah atau sesuai dengan tujuan (Tambunan, 2001). Dalam menjalankannya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berinovasi. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 386 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2017 secara khusus mengatur tentang inovasi daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam melakukan inovasi daerah, diperlukan beberapa peraturan yang dapat memperkuat inovasi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan (Syamsuddin & Fuady, 2020) menyebutkan bahwa akan lebih optimal jika ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian ruang untuk interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara stakeholder dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan (Purwanto, 2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017 inovasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.35 %.

Jika melihat tingkat kemiskinan di Indonesia, pada semester pertama tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14% dari jumlah penduduk atau sekitar 27.542.770 (BPS, 2021). Beberapa program pemerintah yang dicanangkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia belum cukup handal untuk menjadi solusi permasalahan tersebut terutama di dalam pemerintahan daerah atau yang ada dibawahnya. Salah satu daerah yang masih terus menghadapi kemiskinan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data BPS, selama lima tahun berturut-turut tingkat kemiskinan di provinsi ini terus berada diatas angka kemiskinan secara nasional dan selalu diatas 10%. Data terbaru menyebutkan bahwa penduduk miskin di provinsi ini mencapai 12,80% atau sekitar 506.450 jiwa. (BPS, 2021).

Menyadari hal tersebut, salah satu kota di DIY yang terus berupaya menurunkan angka kemiskinan adalah Kota Yogyakarta. Angka kemiskinan di Kota ini juga termasuk tinggi, data terakhir menunjukkan persentasi penduduk miskin di kota ini sebesar 7,27% atau sekitar 32.000 jiwa dari total penduduk 435,936 jiwa. Beberapa inovasi dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya adalah inovasi Gandeng Gendong (selanjutnya disebut program gandeng gendong). Program ini merupakan inovasi daerah yang dicetus oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 10 April 2018 dalam rangka percepatan pencapaian penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan lingkungan di Kota Yogyakarta. Program ini diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Berdasarkan peraturan tersebut, program gandeng gendong ini berisikan bersama bersatu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan 5 *stakeholder* yang saling bersinergi, diantaranya adalah Pemerintah Daerah (Kota), Komunitas, Perguruan tinggi (Kampus), Swasta (Korporasi), dan Masyarakat (Kampung) sebagai basis atau sasaran program ini. (Perwal Kota Yogyakarta No 23 Tahun 2018). Menurut pemaparan Wakil Walikota Yogyakarta konsep gandeng gendong bisa diterapkan diseluruh aspek pembangunan. Kata ‘gandeng’ memiliki arti bahwa semua elemen saling bergandengan tangan untuk saling membantu agar semua pihak bisa maju bersama, sedangkan kata ‘gendong’ memiliki arti bahwa seluruh elemen saling bahu membahu membantu mereka yang tidak mampu berjalan. Kekuatan datang ketika semua element masyarakat bersatu. Yang lemah digendong, yang terpinggirkan ditarik ketengah sehingga bisa berjalan bersama.

Salah satu kegiatan dalam program ini adalah nglarisi, yaitu kegiatan yang memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk menjadi penyedia jamuan makan dan minum dalam setiap kegiatan yang diadakan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kota telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 39.758.310.000 untuk diserap kelompok nglarisi gandeng gendong. (Bappeda Kota Yogyakarta, 2021). Menurut penelitian (Rasyid, 2020), Anggaran jamuan makan minum yang disiapkan Pemkot mampu mengurangi kemiskinan di Kelurahan Cokrodiningratan, hal ini terlihat dari bertambahnya pangsa pasar penjualan dan meningkatnya penghasilan bagi anggota gandeng gendong yang tidak mampu. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2020) menyebutkan bahwa faktor keberhasilan Program Gandeng Gendong diantaranya: a) Komunikasi dan

sosialisasi terkait Program Gandeng Gendong dijelaskan dengan baik dan ada koordinasi antar stakeholder b) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan program ini, sehingga diperlukan peran dari stakeholder. 3) Sikap, dukungan, dan solusi dari pemerintah agar program tidak mengalami hambatan. 4) Belum adanya struktur birokrasi, standar operasional prosedur namun program tetap berjalan sesuai perannya masing-masing.

Dari hasil studi dokumen, program ini merupakan salah satu inovasi daerah yang cukup inovatif, terbukti pada tahun 2020 program ini masuk kedalam 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, selain itu Kota Yogyakarta terpilih menjadi juara dua sebagai Kota Terbaik tingkat nasional dalam acara Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2020. Program ini sudah berjalan selama 3 tahun dan telah mengeluarkan anggaran makan minum sekitar Rp 91.368.517.810 milyar (Bappeda Kota Yogyakarta, 2021)

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena lebih jelas menggambarkan semua fenomena yang ada di Masyarakat dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subjek penelitian kelompok yang ada di gandeng gendong. Proposisi atau dugaan sementara penelitian ini adalah inovasi daerah gandeng gendong mampu mengurangi kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara lisan dan tertulis, Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

Wawancara Terstruktur

Pada teknik ini, peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab secara terbuka, yaitu responden menjawab pertanyaan secara bebas tidak terikat dengan jawaban iya atau tidak. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui jawaban secara luas dan mendalam

Observasi Partisipatif

Peneliti mengamati secara langsung pada kelompok gandeng gendong untuk mendapatkan data terkait kondisi lapangan yang terjadi pada anggota kelompok

Studi Dokumen

Peneliti melakukan studi dokumen yang didapat dari jurnal, berita, hasil rapat, dokumen pemerintah, anggaran, dan lain sebagainya.

Teknik Pengambilan Sample

Berdasarkan data yang didapat dari Bappeda Kota Yogyakarta, terdapat 258 kelompok gandeng gendong yang tersebar diberbagai kecamatan, untuk mendapatkan sample yang tepat, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada jumlah anggota kelompok, jumlah anggota pemegang Kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS), omzet, dan lokasi kecamatan dengan total 21 sample.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis ini merupakan analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari objek penelitian, tanpa menggeneralisasikannya (Sugiyono., 2008). Lebih khusus lagi, penelitian ini menggunakan metode analisis yang dikembangkan Miles dan Huberman yaitu model interaktif. Menurut Sanapuah Faisal dalam (Burhan Bungin, 2003), metode ini merupakan siklus integrasi antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota

Kota atau pemerintah kota adalah merupakan instansi pemerintah yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan program gandeng gendong. Selain itu pemerintah juga mengkoordinir, menyusun, membuat kebijakan, pembinaan, serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan gandeng gendong.

Kampus

Kampus merupakan lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang melaksanakan program Tridharma salah satunya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya kampus menjalankan tugas berupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dan kampung, selain itu kampus juga melakukan studi pengembangan, pelatihan, pendampingan, evaluasi, monitoring, dan menyalurkan dana serta kegiatan pengabdian masyarakat.

Korporasi

Korporasi adalah lembaga swasta atau badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta. Bentuk kepeduliannya berupa dana CSR atau dana lainnya yang bertujuan membantu masyarakat di Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya korporasi tidak hanya membantu dalam hal pendanaan, tetapi turut serta dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat kampung.

Komunitas

Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan hobi dan minat, pekerja atau profesi, pemerhati masalah sosial, ekonomi, dan perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunitas memberikan wadah kepada masyarakat kampung serta berperan aktif dalam promosi dan sosialisasi program gandeng gendong

Kampung

Kampung adalah kawasan wilayah atau masyarakat warga Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran kegiatan gandeng gendong agar lebih berdaya dan meningkat kesejahteraannya. Dalam pelaksanaannya masyarakat kampung membuat kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang untuk menjalankan suatu usaha.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat suatu masyarakat atau kelompok. Dalam hal ini pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat Kampung yang ada di program gandeng gendong. Hasil wawancara dengan 21 kelompok gandeng gendong menunjukkan bahwa program ini memberdayakan setiap anggota kelompok. Disebutkan bahwa instansi-instansi pemerintah sering mengadakan pelatihan kepada kelompok yang ada di masing-masing kelurahan. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan memasak, membuat kue, ketahanan pangan, dsb. Selain itu pihak korporasi juga sering melakukan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat seperti pelatihan manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan packaging produk. Selain pelatihan, pihak swasta juga sering memberikan bantuan dana CSR kepada kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk berkembang seperti pemberian alat-alat memasak, modal usaha, dsb.

Selain dari pemerintah dan swasta, pemberdayaan juga dilakukan oleh koordinator kelompok. Mereka yang menjadi koordinator biasanya memiliki kemampuan lebih di atas mereka yang menjadi anggota biasa. Sehingga koordinator setiap harinya selalu membekali anggota untuk bekerja lebih baik, hal yang biasa dilakukan adalah mengajari mereka membuat makanan yang enak dan layak untuk dijual, mengatur keuangan, manajemen operasional, dsb

Sebelum bergabung di program gandeng gendong, rata-rata mereka merupakan masyarakat yang tidak bekerja atau masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan. Menurut pemaparan pada saat wawancara, program ini sangat memberdayakan mereka karena dengan adanya program ini mereka bisa memiliki kegiatan yang bermanfaat dan tidak menganggur dirumah. Mereka menjadi ibu-ibu yang produktif, bahkan tiap hari selalu ada pesanan sehingga setiap harinya selalu memproduksi. Selain itu ada beberapa kelompok yang mengajak anggota seperti difabel, janda, dan tukang becak. Semua diberdayakan dan menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuannya

Kesejahteraan Masyarakat

Indikator keberhasilan dalam kesejahteraan tidak hanya bergantung pada berapa banyak dana yang disalurkan namun lebih kepada seberapa jauh masyarakat menjadi sejahtera dari adanya dana tersebut. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai kesejahteraan seseorang, diantaranya tingkat pendapatan, tanggungan, konsumsi, dan kondisi lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama koordinator dan para anggotanya, program ini berhasil meningkatkan pendapatan mereka. Anggota yang punya usaha kecil-kecilan mengatakan kalau dulu

jualan masih nitip ke pasar-pasar, kadang habis kadang tidak, jadi pendapatan kadang rugi kadang untung, tapi semenjak bergabung di program gandeng gendong pesannya selalu pasti sehingga tidak ada jualan yang tidak laku, selain itu pesanan juga selalu dalam jumlah yang besar hal ini menambah pemasukan mereka. Disisi lain bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, program ini memberikan pemasukan buat mereka, berdasarkan pemaparan dari beberapa anggota bahwa pemasukannya relatif sesuai dengan berapa banyak pesanan, paling rendah sehari mereka mendapatkan upah sebesar Rp 65.000 dan paling tinggi Rp 150.000.

Jika berbicara tentang omzet, program ini menambah omzet penjualan mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti, kelompok-kelompok yang ada di gandeng gendong terbagi menjadi tiga tipe produksi yaitu spesialisasi, terpusat, dan campuran. (1) Spesialisasi, setiap anggota memiliki spesialisasi masing-masing, ada yang ahli atau memiliki usaha dibidang snack dan ada yang ahli membuat makanan berat, sehingga jika ada pesanan, koordinator langsung membagi tugas sesuai keahlian. (2) Terpusat, setiap ada pesanan semua dilakukan disatu tempat bersama semua anggota. (3) Campuran, dari beberapa sample yang diwawancarai jika ada anggota yang memiliki usaha dan ahli dibidangnya maka pesanan akan diarahkan ke anggota tersebut. Namun beberapa pesanan dilakukan secara terpusat karena membutuhkan banyak tenaga. Bagi mereka yang terpusat, koordinator biasa memberikan upah harian sesuai dengan seberapa banyak orderan yang didapat. Jika dihitung secara keseluruhan, rata-rata penjualan bulanan mereka bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Jika dilihat dari kondisi para anggota, rata-rata mereka memiliki 2-3 tanggungan. Dan kebanyakan ibu rumah tangga serta pelaku usaha kuliner kecil-kecilan. Dengan adanya program ini, pendapatan semakin meningkat dan berpengaruh terhadap tanggungannya. Beberapa kelompok yang terpusat, anggota tidak hanya mendapat upah tetapi juga mendapatkan konsumsi harian dan bekal makanan yang bisa dibawa pulang untuk keluarga.

Program ini berhasil menurunkan kemiskinan, terbukti dari berkurangnya anggota pemegang kartu KMS. Pada saat bergabung, beberapa anggota merupakan anggota miskin yang ditandai dengan kartu KMS. Namun setelah beberapa tahun bergabung dikelompok gandeng gendong, status anggota KMS tersebut ditarik karena pada saat survey tahunan kondisinya telah sejahtera. Selain itu berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir kota yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2017 penduduk miskin sebanyak 7,64 persen dari jumlah penduduk, lalu tahun 2018 menurun menjadi 6,98 persen, 2019 juga menurun menjadi 6,84 persen, akan tetapi tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 7,27 persen. Kemungkinan peningkatan terjadi karena dampak pandemi covid-19

Kemandirian Usaha

Kemandirian usaha mengacu pada sikap atau kondisi usaha yang mengandalkan kemampuan sendiri. Selain memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan, program ini juga memberikan dampak positif kepada kelompok berupa timbulnya kemandirian dalam berusaha. Program ini melatih mereka untuk berwirausaha, terlihat dari kemampuan mereka mengelola keuangan dan pengembangan usaha. Selain menerima pesanan dari pemerintah, mereka juga mulai menerima pesanan dari luar dengan modal yang terkumpul dari penjualan mereka selama bergabung di gandeng gendong. Pelatihan-pelatihan yang diberikan selama ini bermanfaat dan berguna untuk mereka. Bukti lain program ini menciptakan kemandirian usaha adalah pada saat mereka mengelola modal yang terbatas, hampir seluruh OPD melakukan pembayaran dengan cara tempo, sehingga kemandirian dalam mengelola keuangan sangat terbentuk disini

Kekurangan dan Kelemahan Program Gandeng Gendong

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap 21 kelompok gandeng gendong, program ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, berikut penjelasannya

Keunggulan:

Partisipasi dan dukungan berbagai pihak

Keunggulan mendasar dari program ini adalah banyaknya dukungan dari berbagai pihak, khususnya 5 stakeholders yang tergabung dalam program ini. Masyarakat sebagai basis dari program ini sangat antusias dalam menjalankannya, begitu juga dengan pemerintah yang sangat perhatian terhadap program ini. Selain itu pihak swasta dengan CSR dan kemampuan usahanya juga berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat kampung. Akan tetapi peran komunitas dan kampus masih belum terlihat.

Pengelola yang profesional, bertanggung jawab, dan berdedikasi

Bagian utama dalam sebuah kegiatan adalah pengelola yang profesional, bertanggung jawab, dan berdedikasi sehingga mampu mengelola dan memberikan yang terbaik untuk kegiatannya. Berdasarkan hasil pengamatan, pemerintah sering kali membahas program ini dalam setiap agenda, bahkan terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok yang ada di gandeng gendong. Kemampuan berpikir, komunikasi, dan kemampuan teknis membuat program ini terus berinovasi melakukan perbaikan dan pengembangan agar program ini terus berjalan.

Berbasis Teknologi

Program ini dipadukan dengan teknologi digital yang mudah diakses oleh siapapun. Di Kota Yogyakarta memiliki satu aplikasi yang terhubung dengan seluruh layanan yaitu aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Untuk pemesanan juga bisa dilakukan dalam aplikasi ini, sehingga semuanya tersistem dan tercatat.

Kelemahan

Pembayaran

Masalah terbesar yang dirasakan kelompok gandeng gendong adalah masalah pembayaran. Hampir semua kelompok yang peneliti wawancarai selalu mengeluh dengan sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan OPD biasa seminggu-sebulan setelah pemesanan. Hal ini memberatkan kelompok ketika ingin berproduksi kembali, modal yang dibutuhkan cukup besar. Setelah peneliti cari tau penyebabnya adalah birokrasi yang ada di instansi masing-masing, karena ini menggunakan uang negara maka ketentuannya adalah harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar uangnya cair. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi semenjak awal adanya program, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat ketentuan dengan membagi dua sistem pembayaran. Bagi transaksi yang dibawah Rp 500.000 pembayaran dilakukan secara tunai, namun jika transaksi diatas itu pembayaran dilakukan secara transfer dan tempo. Namun ini kembali dengan kemampuan masing-masing OPD serta kesepakatan bersama kelompok gandeng gendong. Dilain hal, bagi koordinator yang menerapkan spesialisasi, terpaksa harus menalangnya terlebih dahulu, karena pada saat pembayaran dengan anggota yang membuat pesanan, koordinator membayarnya secara tunai. Ini menjadi bermasalah ketika coordinator kehabisan modal.

Modal

Seperti pemaparan diatas, bahwa sistem pembayaran kebanyakan tempo dengan rentang waktu seminggu-sebulan. Sehingga dari permasalahan ini timbul permasalahan baru yaitu permodalan, bagi mereka yang memiliki modal terbatas maka akan kesulitan untuk memproduksi jika ada pesanan lagi apalagi pesanan dalam jumlah besar. Disebutkan juga bahwa dari awal bergabung tidak pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah, lalu jika ingin mendapatkan modal dari swasta harus membuat proposal terlebih dahulu. Beberapa kelompok berhasil mendapat permodalan dari dana CSR Swasta dengan total yang berbeda-beda, rata-rata mendapat 10-20 juta dan bantuan peralatan

Koordinasi antar Stakeholder belum terjalin maksimal

Kerjasama antar stakeholder masih berjalan sendiri-sendiri dan masih didominasi pemerintah kota dengan kampung. Posisi komunitas dan kampus masih belum terlihat kontribusinya terhadap program ini

Ketidakmerataan Pesanan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan disetiap kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah, terdapat ketidakmerataan pesanan. Beberapa OPD sering memesan hanya ke beberapa kelompok yang sudah mereka kenal, sehingga pesanan hanya berputar dikelompok itu saja. Hal ini menjadi ancaman bagi kelompok baru atau kelompok yang belum terkenal.

SIMPULAN

Dari hasil studi lapangan dan analisis diatas, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: (1) Inovasi daerah gandeng gendong berperan penting dalam memberdayakan dan mengurangi masyarakat miskin, (2) Inovasi daerah gandeng gendong secara efektif berhasil meningkatkan kesejahteraan, (3) Selain memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan, inovasi ini berhasil menciptakan kemandirian usaha, (4) Program ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan program ini adalah: Partisipasi dan dukungan berbagai pihak, Pengelola yang profesional, bertanggung

jawab, dan berdedikasi, Berbasis Teknologi. Sedangkan kelemahannya adalah pembayaran dilakukan tempo, modal terbatas, dan koordinasi antar stakeholde belum terjalin maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2007). Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan. *Kumpulan Bahan Latihan*, 1–242.
- Bappenas. (2021). Diagnosis Kemiskinan. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)*, 13–73. <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni>
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Dowling, J. M. (John M., & Valenzuela, R. J. (2010). *Economic development in Asia*. 427.
- Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1–30.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi pembangunan : teori, masalah, dan kebijakan*. 444.
- Maipita, I., & Fitrawaty. (2014). *MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN*. 262.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Purwanto. (2019). *Inovasi Kebijakan: Strategi Terpadu Menurunkan Kemiskinan di Kota Semarang*. 15(29), 14–30.
- Rasyid. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gandeng Gendong di Kelurahan Cokroiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta*.
- Remi, S. S., & Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia : suatu analisis awal*. 134.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*.
- Sutikno, S., Soedjono, E. S., Rumiati, A. T., & Trisunarno, L. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 135. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia : teori dan temuan empiris*. 311.
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714>
- Todaro, & Smith. (2015). *Economic development (series in economics)*. 891.
- Wulandari, C. (2020). *Implementasi Program Gandeng Gendong dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2019*.